ANALISIS PENYELENGGARAAN JAMINAN PENSIUN Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 tahun 2015

Muhammad Ridhwan Galela¹

ABSTRACT

In addition to mandated in the Constitution of 1945, the pension insurance program for all citizens is a necessity given Indonesian demographic projections that show significant change in the structure of the population of Indonesia. Demographic projections show that the dependency ratio is higher due to increasing in life expectancy and decreasing in fertility of women. Anticipating these conditions, Indonesian government implemented a national pension insurance program by issuing PP 45/2015. However, there are some problems in the implementation of the program. Problem related to national budget is the emergence of fiscal risks due to an imbalance of the amount of funds derived from contributions to the pension benefit payment liabilities. From the operational side, the concern arises from the ability of fund managers in implementing good corporate governance and their ability to provide adequate information technology infrastructure. Besides, informal sector workers and women should receive more attention in the pension insurance program.

ABSTRAK

Selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, program jaminan pensiun bagi seluruh warga negara menjadi suatu kebutuhan mengingat proyeksi demografi Indonesia yang menunjukkan perubahan signifikan struktur penduduk Indonesia. Proyeksi demografi menunjukkan rasio ketergantungan yang semakin tinggi akibat usia harapan hidup yang semakin tinggi dan fertilitas wanita yang semakin menurun. Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mengimplementasikan program jaminan pensiun nasional dengan menerbitkan PP No. 45 Tahun 2015. Namun demikian, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Permasalahan yang berhubungan dengan keuangan negara adalah timbulnya risiko fiskal akibat ketidakseimbangan jumlah dana yang berasal dari iuran dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Dari sisi operasional, kekhawatiran muncul dari kemampuan pengelola dalam implementasi tata kelola yang baik dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selain itu, pekerja sektor informal dan para wanita perlu mendapat perhatian lebih dalam program jaminan pensiun.

1. PENDAHULUAN

Jaminan pensiun nasional bertujuan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat ketika memasuki masa pensiun. Bagi pemerintah, program pensiun juga memiliki tujuan redistribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Karakteristik asuransi dari pensiun akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian di masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari jaminan sosial nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, jaminan pensiun merupakan kewajiban pemerintah

kepada seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari kewajiban tersebut, kebutuhan akan jaminan pensiun tercipta dari kondisi Indonesia di masa yang akan datang, terutama proyeksi demografi.

Tulisan ini memaparkan prediksi demografi Indonesia di masa yang akan datang dan persoalan jaminan sosial yang timbul akibat perubahan demografi tersebut. Selanjutnya dibahas langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial masyarakat. Bagian inti dari tulisan ini yaitu analisis terhadap peraturan tentang jaminan pensiun, terutama

¹ Kepala Subbidang Seleksi dan Penempatan, Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Pengembangan SDM.
Email mrgalela@gmail.com

permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari implementasi peraturan dengan harapan dapat diperbaiki di masa yang akan datang.

2. SEJARAH PROGRAM PENSIUN DI INDONESIA

Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri telah lama menikmati tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua (THT). Undang-Undang yang mengatur pensiun PNS disahkan pada tahun 1969, sementara untuk TNI/Polri disahkan tahun 1966. THT diatur oleh Peraturan Pemerintah yang diterbitkan tahun 1981 untuk PNS dan tahun 1991 untuk TNI/Polri. Pengelola pensiun PNS yaitu BUMN PT Taspen dan pengelola pensiun TNI/Polri yaitu BUMN PT ASABRI. Keanggotaan bersifat wajib dengan manfaat pasti maksimum yang diterima peserta sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Potongan gaji untuk iuran pensiun adalah 4,75% dan untuk THT sebesar 3,25%. Suami/Istri atau anak dapat menerima manfaat pensiun bila peserta meninggal. Usia pensiun PNS bervariasi berdasarkan profesinya, dengan usia pensiun normal 58 tahun (56 tahun sebelum 2014). Usia pensiun TNI adalah 58 tahun untuk perwira (sama dengan usia pensiun Polri) dan 53 tahun untuk tamtama dan bintara.

Berdasarkan UU No. 3 tahun 1992, pekerja swasta dilindungi dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang bersifat wajib dan jaminan kesehatan yang bersifat opsional. Dana yang berasal dari iuran pekerja swasta dikelola oleh BUMN PT Jamsostek. Tidak ada jaminan pensiun yang bersifat wajib bagi pekerja swasta. Pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya menerima pesangon yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003.

Perlindungan bagi pekerja sektor informal juga diatur dalam UU No. 3 tahun 1992, namun demikian sifat kepesertaannya yang bersifat sukarela menyebabkan jumlah peserta dari sektor informal tidak banyak. Terlebih lagi, para pekerja sektor informal banyak yang tidak menetap di satu lokasi sehingga sulit untuk menentukan alamat domisili yang diperlukan dalam

administrasi kepesertaan.

Pekerja swasta yang ingin menjadi peserta dana pensiun dapat mendaftar pada lembaga pengelola pensiun secara sukarela berdasarkan UU No. 11 tahun 1992. Ada dua jenis lembaga yang mengelola dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua jenis lembaga ini dapat menawarkan program pensiun manfaat pasti atau kontribusi pasti.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah rasio cakupan program yang relatif kecil, sekitar 10%. Jumlah ini termasuk PNS, TNI, dan Polri dengan porsi 5%. Artinya, rasio cakupan program pensiun untuk pekerja swasta hanya sekitar 5%. Untuk pekerja sektor informal, program pensiun masih dianggap mahal karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar premi pensiun.

3. PROYEKSI DEMOGRAFI

Kondisi demografi Indonesia di masa yang akan datang diprediksi jauh berbeda dengan saat ini. Kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik menyebabkan harapan hidup semakin meningkat. Peningkatan harapan hidup ini mengubah piramida penduduk Indonesia akibat jumlah para usia lanjut yang semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan beberapa dekade terakhir menimbulkan dampak yang sangat positif pada kesehatan masyarakat. Dampak yang jelas terlihat adalah pada kecenderungan semakin tingginya harapan hidup masyarakat. Faktor lain yang juga mempertinggi harapan hidup adalah perbaikan sanitasi dan fasilitas kesehatan modern yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Menurut BPS, Bappenas, dan UNDP Indonesia (2004) usia harapan hidup meningkat dari 45 pada tahun 1970 menjadi 66 pada tahun 2002. Berdasarkan proyeksi yang lebih baru, usia harapan hidup penduduk Indonesia akan menjadi 72,2 pada tahun 2030-2025 (Bappenas, BPS dan UNDP 2013).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkorelasi dengan program keluarga berencana. Empat dekade terakhir, program keluarga

berencana telah berhasil menurunkan jumlah anak dalam keluarga. Tingkat fertilitas wanita Indonesia tahun 1950-1955 adalah 5,49 (seorang wanita semasa hidupnya melahirkan bayi rata-rata sejumlah 5,49 orang), tetapi tahun 2000-2005 tingkat fertilitasnya menurun menjadi 2,325 (United Nations, 2004). Diprediksi bahwa tingkat fertilitas tersebut akan menurun menjadi 1,85 pada tahun 2050-2055. Fertilitas wanita yang menurun, menyebabkan laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Tahun 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan 1,38%. Persentase ini akan terus menurun menjadi 0,62% pada tahun 2030-2035 (Bappenas, BPS dan UNDF, 2013).

Kecenderungan peningkatan usia harapan hidup dan keberhasilan program keluarga berencana menyebabkan kenaikan jumlah usia lanjut. Bank Dunia (1994) memprediksi bahwa populasi usia di atas 60 pada tahun 1990 hanya 6,4%, sementara tahun 2010 menjadi 10,9%. Kecenderungan peningkatan ini akan terus berlanjut dan diprediksi jumlah usia lanjut pada tahun 2050 menjadi 30,1%. Lebih dari itu, median usia di tahun 2005 adalah 26,5 tahun, sementara di tahun 2050 menjadi 41,1 tahun.

Jumlah wanita yang berusia lanjut lebih banyak ketimbang jumlah pria yang berusia lanjut. Untuk rentang usia 0-60 tahun, menurut Bappenas, BPS dan UNDF (2013), jumlah pria dibanding jumlah wanita relatif seimbang pada periode 1971-2010. Sementara itu, rasio tersebut menurun menjadi 85-95 untuk usia 70-75 tahun dan menurun kembali menjadi 70-80 untuk usia +75 tahun.

Saat ini, sebagian besar usia lanjut tinggal di daerah pedesaan ketimbang daerah perkotaan. Tetapi, bukan tidak mungkin bahwa kondisi berbeda akan terjadi. Rasio usia lanjut pedesaan dibandingkan perkotaan tahun 2003 sebesar 2,3. Pada tahun 2020 rasio ini diperkirakan menjadi 1,7. Penyebab utama adalah jumlah orang yang tinggal di perkotaan telah meningkat tajam. Tahun 1950, hanya 12% orang Indonesia tinggal di perkotaan, sementara jumlah tersebut menjadi 32% di tahun 1992 (US Census Bureau, 1992). Penyebab pergeseran ini adalah laju urbanisasi yang cukup tinggi. Tahun 2010 persentase penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan

49,8% dan pada tahun 2035 diperkirakan akan meningkat tajam menjadi 66,6% (Bappenas, BPS dan UNDF 2013).

4. MASALAH JAMINAN SOSIAL DI MASA DEPAN

Proyeksi demografi Indonesia di atas menimbulkan kekhawatiran di masa yang akan datang. Perubahan cepat populasi usia lanjut akan menciptakan masalah jaminan sosial baru di masa depan. Semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat, semakin panjang pendapatan yang diperlukan untuk menopang hidup di masa pensiun. Karena kondisi kesehatan manusia usia lanjut menurun secara cepat maupun perlahan, pengeluaran untuk biaya kesehatan juga semakin meningkat. Berbagai pelayanan kesehatan dan obat-obatan diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Di sisi lain, pendapatan reguler telah terhenti atau menurun ketika memasuki masa pensiun. Jika para manusia lanjut usia ini tidak memiliki pendapatan dari pensiun atau akumulasi tabungan, mereka akan bergantung secara ekonomi pada keluarga dekat, misalnya anak mereka.

Akibat penurunan fertilitas wanita, jumlah anggota keluarga dan kemampuan mendukung secara ekonomi menjadi menurun. Pada awal tahun 1950, rata-rata keluarga Indonesia terdiri dari 8 anggota, sementara di tahun 1990 menjadi 4,5 (Arifianto, 2006). Dengan jumlah anak yang cukup banyak di masa lalu, para orang tua tidak terlalu sulit untuk memperoleh *support* secara ekonomi dari anak-anaknya setelah masa pensiun. Ketika jumlah anggota keluarga menurun, semakin sedikit anak-anak yang bisa membantu orang tua, terlebih lagi mereka juga menghadapi kecenderungan biaya pendidikan yang meningkat bagi keturunannya.

Urbanisasi yang cenderung meningkat menyebabkan para orang tua dan anak semakin terpisah oleh jarak. Meskipun para orang tua memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai masa tua, mereka kehilangan kontak fisik dengan anak dan cucu mereka. Salah satu solusi untuk kebutuhan sosial dan emosional ini adalah dengan menempatkan para orang tua usia lanjut di panti jompo. Tetapi, sebagian besar

masyarakat Indonesia menganggap bahwa menempatkan orang tua mereka di panti jompo adalah sesuatu yang secara moral tidak baik karena dianggap tidak membalas budi orang tua.

Pertumbuhan penduduk yang menurun menyebabkan beban orang muda untuk mendukung para usia lanjut menjadi lebih berat di masa depan. Menurut data PBB, rasio ketergantungan usia-lanjut (*old-age dependency ratio*) Indonesia di tahun 2005 adalah 8 yang berarti setiap 100 orang usia produktif (15 – 65 tahun) menanggung 8 orang usia lanjut di atas 65 tahun. Pada tahun 2050, rasio ini diperkirakan akan menjadi 28 (Asher, 2010) yang berarti orang muda harus menanggung lebih banyak orang usia lanjut.

Usia harapan hidup wanita yang lebih tinggi menciptakan kebutuhan proteksi pendapatan wanita lebih tinggi dibandingkan pria di masa tuanya. Kondisi saat ini, tingkat partisipasi wanita pada penawaran tenaga kerja jauh lebih rendah dibandingkan pria. Terlebih lagi, pendapatan rata-rata para pekerja wanita juga lebih rendah dibandingkan rata-rata pendapatan pekerja pria. Situasi ini membuat para wanita tidak mudah menabung dari uang yang berasal dari pendapatan mereka.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mengantisipasi perkembangan demografi di atas dan melaksanakan amanat undang-undang dasar, pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial. Salah satu yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan sistem pensiun nasional. Melalui PP No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Penyelenggara pensiun adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari PT Jamsostek. Berbeda dengan Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan berbentuk badan hukum publik dan bersifat nirlaba. Taspen dan ASABRI sebagai penyelenggara pensiun untuk pegawai negeri dan TNI akan dilebur ke dalam BPJS ketenagakerjaan tahun 2029.

Prinsip dari penyelenggaraan pensiun adalah

kegotongroyongan, nirlaba, “keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas”, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Sistem pensiun yang sejalan dengan prinsip kegotongroyongan adalah *pay-as-you-go* dengan ciri manfaat yang diterima pensiunan saat ini berasal dari kontribusi pekerja aktif atau penerimaan pajak pemerintah.

Usia pensiun telah disesuaikan dengan proyeksi demografi penduduk Indonesia. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019. Selanjutnya, usia pensiun bertambah satu tahun sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Peraturan menetapkan sistem manfaat pasti. Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan formula pensiun. Formula pensiun adalah 1% dikalikan dengan masa melakukan iuran dibagi 12 bulan dikalikan rata-rata upah tahun tertimbang selama masa iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang adalah upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum. Manfaat pensiun disesuaikan setiap tahun dengan angka indeks, yaitu satu ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh BPS. Untuk pertama kali, manfaat pensiun ditetapkan paling sedikit Rp300.000,00 dan paling banyak Rp3.600.000,00 dan akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Manfaat ini diterima bulanan setelah masa pensiun bila peserta telah memiliki masa iur paling sedikit 15 tahun. Bila kepesertaan belum 15 tahun, manfaat pensiun diterima *lumpsum* ketika memasuki masa pensiun.

Sifat asuransi dari pensiun tergambar dari aturan yang menetapkan kondisi pada saat peserta tidak lagi mampu bekerja. Bila peserta meninggal dunia, manfaat pensiun diterima janda/duda sebesar 50% dari formula pensiun (bila meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun) atau 50% dari manfaat pensiun hari tua atau manfaat pensiun cacat. Dalam kondisi tertentu, manfaat pensiun diterima oleh anak atau orang tua. Manfaat pensiun anak sebesar 50%, sedangkan manfaat pensiun orang tua sebesar 20%.

Besarnya iuran jaminan pensiun yang

dibayarkan setiap bulan adalah 3% dari upah per bulan, dengan ketentuan 2% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta. Besarnya iuran ini akan dievaluasi setiap 3 tahun sebagai dasar untuk penyesuaian iuran hingga mencapai 8%. Upah yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pensiun adalah upah pokok dan tunjangan tetap per bulan yang untuk tahun 2015 ditetapkan batas tertingginya adalah Rp7.000.000,00.

6. ANALISIS ATAS KEBIJAKAN JAMINAN PENSIUN

6.1. Risiko Fiskal

Sistem manfaat pasti yang ditetapkan dalam undang-undang dapat menimbulkan beban bagi pemerintah ketika dana kelolaan lebih rendah dari manfaat pensiun yang harus dibayarkan. Pemerintah harus menyediakan pendanaan APBN lebih banyak untuk masalah jaminan sosial di masa depan. Tetapi, kemampuan pemerintah Indonesia di masa depan mungkin tidak lebih baik dibandingkan saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2050 diperkirakan relatif stabil dibandingkan posisi saat ini. Menurut Hawksworth (2006), GDP Indonesia tahun 2005 dengan standar PPP sebesar 3.702 (pada saat yang sama Jepang 30.081). Sementara itu, GDP Indonesia tahun 2050 diperkirakan 23.685 (Jepang akan menjadi 70.646). Dengan nilai GDP seperti itu, Indonesia masih diklasifikasikan sebagai negara dengan pendapatan menengah dan bawah di tahun 2050.

6.2. Pensiun PNS dan TNI

Permasalahan klasik pada pensiun pegawai negeri dan TNI/Polri belum terselesaikan. Setiap pegawai negeri berkontribusi sebesar 4,75% dari pendapatannya setiap bulan untuk program pensiun. Iuran ini dikelola oleh BUMN, PT Taspen. Sementara itu, iuran pensiun TNI/Polri yang dikelola BUMN PT ASABRI ditanggung oleh pemerintah. Masalah timbul karena dana yang dikelola kedua BUMN ini tidak mencukupi untuk membayar para pensiunan atau keluarganya. Seluruh dana yang diperlukan untuk

pembayaran pensiun PNS dan TNI/Polri diambil dari APBN. Pada tahun 2011 jumlah dana APBN yang dialokasikan untuk membayar pensiun sekitar 60 triliun dengan peningkatan sekitar 10 triliun setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, Aset PT Taspen pada tahun 2011 hanya sejumlah 100 triliun. Beban APBN untuk pembayaran pensiun akan relatif besar sebelum Taspen dan ASABRI digabung dalam BPJS.

6.3. Investasi

Terlepas dari jumlah pekerja sektor formal yang sudah menjadi anggota Dana Pensiun Pemberi Kerja/Lembaga Keuangan, pemerintah mengelola dana pensiun melalui perusahaan publik dan nirlaba sebagai pengelola. Perusahaan ini akan menjadi *trust fund* dan tidak dikenakan pajak atau pembagian dividen untuk pemerintah. Tiga BUMN yang sudah ada (Taspen, ASABRI, Jamsostek) harus dikonversi menjadi perusahaan nirlaba menurut undang-undang. Kebijakan ini menghilangkan kompetisi dalam penyediaan jasa pensiun di antara perusahaan swasta. Dengan mempertimbangkan kinerja rendah dari BUMN di masa lalu, diragukan apakah BUMN-BUMN ini akan mereformasi dirinya menjadi perusahaan yang dikelola dengan baik (Arifianto, 2004).

Program pensiun yang bersifat jangka panjang membutuhkan investasi yang bersifat jangka panjang pula. Terbatasnya instrumen keuangan yang memiliki risiko kecil dengan imbal hasil yang memadai menyebabkan banyak dana diinvestasikan pada surat berharga pemerintah yang memiliki risiko dan imbal hasil yang rendah. Kondisi ini menyebabkan, kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan/PT Jamsostek tidak terlalu bagus. Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan (2015), imbal hasil yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 9%. Mengingat inflasi di Indonesia berfluktuasi cukup tinggi (sekitar 8% di tahun 2013 dan 2014, dan 3,35% di tahun 2015), pertumbuhan riil dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tergolong lambat. Bila kondisi ini bertahan dalam jangka waktu yang lama, BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mampu membayar pensiun dengan sistem manfaat pasti.

Table 1. Laju Inflasi dan Pertumbuhan Upah

Tahun	Laju Inflasi (%)	Pertumbuhan Upah (%)
2001	12,06	34,18
2003	5,06	14,34
2005	17,11	10,73
2007	6,59	10,91
2009	2,78	11,77
2011	3,79	8,80
2013	8,38	19,06

Sumber: www.bps.go.id

6.4. Indeksasi

Penggunaan indeksasi berdasarkan inflasi tahun sebelumnya bukan tanpa masalah. Data historis menunjukkan pertumbuhan upah di Indonesia cenderung lebih tinggi di bandingkan laju inflasi (lihat Tabel 1). Perbedaan ini menyebabkan manfaat pensiun tertinggal dibanding upah pekerja aktif. Dalam jangka panjang, perbedaan kecil ini dapat menimbulkan selisih yang sangat besar.

6.5. Perlindungan Terhadap Wanita

Para wanita masih belum cukup terlindungi dalam aturan penyelenggaraan pensiun. Tingkat partisipasi wanita dalam tenaga kerja yang rendah dengan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan pria menyebabkan para wanita membutuhkan perlindungan yang lebih besar di masa tua. Manfaat pensiun janda sebesar 50% diperkirakan belum mampu menutupi kebutuhan mereka. Manfaat pensiun yang wajar untuk mereka adalah 60%-70%.

6.6. Pekerja Sektor Informal

Pekerja sektor informal di Indonesia sekitar dua per tiga dari seluruh pekerja. Memasukkan pekerja sektor informal ke dalam program pensiun akan meningkatkan rasio cakupan (*coverage ratio*) secara signifikan. Tetapi, pengalaman dari sistem sebelumnya dan negara lain menunjukkan bahwa mengajak sektor informal ikut berkontribusi dalam program jaminan sosial nasional adalah sangat sulit (Wiener, 2009). Alasan utama adalah banyak pekerja informal berpindah tempat kerja, jenis pekerjaan, dan alamat domisili.

6.7. Sistem Informasi

Pertumbuhan Kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Kepesertaan aktif di tahun 2015 sejumlah 19,27 juta dengan rata-rata pertumbuhan 17% (BPJS Ketenagakerjaan 2015). Pertumbuhan ini diperkirakan akan lebih cepat di tahun-tahun berikutnya karena adanya kewajiban kepesertaan. Dalam beberapa tahun ke depan, BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi lembaga keuangan dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia. Pengalaman dalam mengelola data peserta dengan jumlah kepesertaan yang sangat tinggi belum dimiliki oleh perusahaan sebelumnya (PT Jamsostek). Persiapan menghadapi sistem teknologi informasi yang semakin kompleks wajib dimulai saat ini supaya bisa dihindari risiko terhentinya proses bisnis akibat kemacetan sistem.

Sistem informasi yang diperlukan untuk sistem *pay-as-you-go* yang ditetapkan dalam undang-undang lebih sederhana ketimbang sistem informasi pada sistem *fully-funded*. Sistem *fully-funded* membutuhkan pencatatan tidak hanya iuran, tetapi juga imbal hasil dari investasi yang dilakukan untuk setiap iuran yang berasal dari peserta. Mengingat kelemahan sistem *pay-as-you-go* dibandingkan *fully-funded*, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang terjadi pergantian sistem. Untuk tujuan berjaga-jaga, lebih baik sejak awal sistem didesain mengantisipasi perubahan ini.

6.8. Portabilitas

Persyaratan mengenai portabilitas dari sistem pensiun menambah persyaratan sistem informasi menjadi kompleks. Sistem pensiun

harus bisa diakses oleh pensiunan ketika mereka melakukan hijrah dari kota ke desa, seperti yang banyak dilakukan di Indonesia. Portabilitas bukan hanya kemudahan penyetoran iuran lewat jaringan ATM perbankan, tetapi juga kemudahan penerimaan manfaat pensiun ketika telah memasuki masa pensiun.

Portabilitas menjadi lebih rumit bagi sistem informasi ketika seorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Menurut BPS, ditahun 2007 ada 26 juta jiwa bekerja di sektor formal dan 61,5 juta jiwa bekerja di sektor informal. Para pekerja di sektor informal yang jumlahnya sangat besar ini mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berpindah pekerjaan dan lokasi. Selain itu, bukan tidak mungkin persyaratan portabilitas (sebagai sebuah prinsip dari BPJS) menghendaki agar sistem informasi terintegrasi sehingga tidak ada masalah ketika seorang pekerja berpindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke lembaga pengelola dana pensiun, atau sebaliknya.

6.9. Perceraian

Tingkat perceraian pernikahan yang cukup tinggi di Indonesia (sekitar 10%) berpotensi menimbulkan masalah penentuan pihak mana yang berhak menerima pensiun. Perlu dibuat peraturan mengenai pembagian manfaat pensiun apabila terjadi perceraian supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

7. KESIMPULAN

Demografi Indonesia masa datang akan berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Penduduk usia lanjut di Indonesia semakin meningkat, sementara jumlah usia produktif semakin menurun. Jumlah anak dalam keluarga semakin menurun dan cenderung terpisah dengan orang tua akibat arus urbanisasi. Kondisi ini menciptakan kebutuhan sistem penjaminan pensiun karena para orang tua di masa depan tidak lagi dapat bergantung pada anaknya.

Pemerintah telah mengantisipasi kerentanan yang mungkin timbul dari perubahan demografi ini dengan mengimplementasikan program jaminan pensiun nasional. Program yang bersifat wajib ini telah mengantisipasi peningkatan harapan hidup dengan menaikkan usia pensiun secara bertahap. Prinsip penting lain dari

program pensiun ini yaitu kegotongroyongan, nirlaba, dana amanat, portabilitas.

Terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan dalam implementasi sistem pensiun saat ini. Persoalan ketergantungan pada APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS dan TNI belum ada tanda-tanda terselesaikan. Sistem manfaat pasti menimbulkan risiko yang cukup besar di APBN. Keraguan terwujudnya sistem tata kelola yang baik pada BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan yang masih rendah akibat belum terjangkaunya kepesertaan dari pekerja di sektor informal. Infrastruktur sistem informasi belum memadai untuk mengolah data kepesertaan yang akan meningkat tajam. Perlindungan terhadap wanita yang memiliki harapan hidup yang lebih tinggi masih lemah.

8. REFERENSI

Arifiyanto, A. (2004). "Social Security Reform in Indonesia: An analysis of the National Social Security Bill (RUU Jamsosnas)." Working paper, the SMERU Research Institute, Jakarta, Indonesia, September 2004.

Arifiyanto, A. (2006). "Public Policy towards the elderly in Indonesia: Current policy and future directions." The SMERU Research Institute, Jakarta, Indonesia, March 2006.

Asher, M.G. (2010). "The Global Economic Crisis: An opportunity for strengthening Asia's social protection systems?" Asian Development Bank Institute (ADBI) working papers no 198, February 2010.

Bank Dunia (1994). "Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Poor and Promote Growth." Oxford University Press, Oxford, England.

BPS, Bappenas, and UNDP Indonesia (2004). "Human Development Report: The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia." BPS, Bappenas, and UNDP Indonesia, Jakarta.

Bappenas, BPS, UNPF (United Nations Population Fund) (2013). *Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Indonesia*.

- Bappenas, BPS, United Nations Population Fund, Jakarta.
- BPJS Ketenagakerjaan (2015). Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 2015. Harian Kompas, 28 Januari 2016.
- Hawksworth, J. (2006). "The World in 2050: How big will the major emerging market economies get and how can the OECD compete?" Accessed February 25, 2011 <http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/pdf/world2050emergingeconomies.pdf> Price Water House Coopers.
- Wiener, M. (2009). Draft White Paper "Old Age Saving Program, Pension Program, and Death Benefit Program National Social Security System." Ministry of Finance of The Republic of Indonesia, 2009.
- United Nations (2004). "World Populations to 2300." United nations, New York.
- US Census Bureau (1992). "Population Trends Indonesia." Accessed February, 2011 <<http://www.census.gov/ipc/prod/ppt/Indonesia92.pdf>>